



## Strategi Transformasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sri Widodo<sup>1\*</sup>, Monika Kurnia Sari<sup>2</sup>, Wiyasto Dwi Handono<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia

\*[widosri@upy.ac.id](mailto:widosri@upy.ac.id)

### Keywords:

Quality of Human Resources, Local Government, Quality of Financial Statements, Government Accounting Standards, Transparency, Utilization of Information Technology

### Citation:

Widodo, S., Sari, Monika K., Handono, W. D. (2025). Strategi Transformasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 25(1), 43 – 51

### ABSTRACT

Local governments are one of the government entities that must continue to strive to improve transparency and accountability in financial management to realize good governance. The purpose of the study was to determine the effect of government accounting standards, human resource competence, and the use of information technology on the quality of financial statements of the local government of Yogyakarta City. This type of research is quantitative research with sampling using purposive sampling methods with certain criteria. The hypothesis testing tool uses SPSS. The results of this study prove that the application of appropriate government accounting standards, as well as increasing investment in the quality of adequate human resources, and optimal use of technology can improve the quality of local government financial statements in Yogyakarta City. The implication of this research is that the improved quality of local government financial statements assists government entities in optimizing financial management to meet the needs of the community.



## PENDAHULUAN

Sistem otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang telah diterapkan di negara Indonesia. Sistem otonomi daerah memiliki wewenang untuk menata dan mengurus seluruh kegiatan pemerintahan secara mandiri (Schakel & Romanova, 2022). Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka pemerintah daerah wajib menyampaikan seluruh laporan keuangannya. Sistem akuntansi yang baik dibutuhkan agar terciptanya laporan yang akuntabel dalam mencapai tujuan organisasi secara transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Laporan keuangan yang sudah dibuat dan kemudian audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasilnya akan disampaikan pada pemangku kepentingan terutama DPRD/DPR dan seluruh masyarakat (Setyaningrum et al., 2020). Hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah berguna untuk pengambilan keputusan berlandaskan dengan informasi yang sudah diaudit secara terbuka, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat evaluasi berbentuk opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pengecekan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negeri, mengatur 4 opini yang di berikan oleh pemeriksa BPK. Opini tersebut adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP). Furqan et al. (2020) menyatakan bahwa penentuan opini didasarkan pada empat kriteria berikut, yaitu: (1) kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang di dasarkan dengan sistem akuntansi akrual, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. dan peraturan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada bulan Oktober tahun 2022 terdapat 9.158 temuan dengan nilai sebesar Rp18,37 triliun. Temuan yang berhubungan dengan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 7.020 dan 8.116 permasalahan berhubungan dengan ketidakpatuhan ketetapan peraturan undang-undang dengan nilai sebesar Rp17,33 triliun. Ditemukan pula 538 permasalahan berhubungan dengan penerapan ekonomi, efisiensi dan efektifitas dengan nilai sebesar Rp1,04 triliun. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2022 atas laporan keuangan pemerintahan pusat sebanyak 137 laporan keuangan. Sebagian besar (132 laporan keuangan) mendapat opini WTP. Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WDP sebanyak 4. Pada tahun 2021 dari 542 LKPD, terdapat 1 (satu) pemerintah daerah yang belum melaporkan LKPD, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Berdasarkan pemeriksaan 541 laporan keuangan, terdapat 500 pemerintah daerah mendapat opini WTP (92,4%), opini WDP 38 (7%), serta 3 pemerintah daerah mendapatkan opini TMP (0,6%) (BPK RI, 2022).

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 menyatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh opini WTP. Hal ini dimungkinkan karena terdapat komitmen nyata dari DPRD dan manajemen Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendorong perbaikan atas pengelolaan keuangan, dengan mengimplementasikan prinsip pengelolaan keuangan sesuai standar. Tetapi BPK masih mendeteksi adanya masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangannya, masalah tersebut adalah: pengelolaan piutang pajak serta retribusi daerah belum mencukupi, pengelolaan izin reklame belum tertib, dan pengelolaan aset tetap belum tertib (BPK RI Perwakilan DIY, 2022).

Penelitian sebelumnya telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (Ayem & Amahala, 2023; Erawati & Abdulhadi, 2018), sistem informasi akuntansi (Ayem & Amahala, 2023), kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern (Rahmawati et al., 2022) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan literatur lainnya menemukan komitmen organisasi (Ayem & Amahala, 2023), pemahaman sistem akuntansi keuangan dan kapasitas sumber daya manusia (Erawati & Abdulhadi, 2018) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kebaruan penelitian ini menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang sebelumnya belum pernah dilakukan di pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Penerapan standar yang optimal dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dan pelaporan keuangan juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dapat menghasilkan laporan keuangan lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam menyusun serta menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### ***Stewardship Theory***

*Stewardship theory* menekankan bahwa individu dalam organisasi, khususnya manajer dan dewan direksi, bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang perilakunya secara alami selaras dengan kepentingan organisasi dan pemangku kepentingannya. Menurut pandangan teori ini, pemimpin organisasi termotivasi untuk melayani kepentingan dan misi terbaik organisasi, daripada didorong oleh motif mementingkan diri sendiri. *Stewardship theory* mempromosikan gagasan bahwa individu bertindak sebagai penjaga nilai dan hasil, khususnya dalam lingkungan pemerintahan, dan bukan semata-mata dimotivasi oleh kepentingan pribadi (Perlman et al., 2020). *Stewardship theory* menunjukkan tanggung jawab atas kinerja yang baik dengan mengungkapkan laporan keuangan yang

secara akurat mewakili kekayaan dan sumber daya daerah (Arifin, 2020). Teori ini bertujuan untuk menawarkan informasi berharga dalam laporan keuangan untuk menilai kepengurusan manajemen, menekankan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

### ***Resource Dependence Theory***

*Resource dependence theory* atau teori ketergantungan sumber daya menekankan bahwa organisasi harus memperoleh sumber daya eksternal untuk mencapai kesejahteraan (Yu & Greer, 2023). Teori ketergantungan sumber daya menyoroti berbagai dimensi ketergantungan, termasuk ketergantungan lokasi, antarorganisasi, dan intraorganisasi, dan menggarisbawahi pentingnya mengelola ketergantungan ini secara efektif (Jiang et al., 2023). Keberhasilan organisasi terletak pada pengelolaan ketergantungan dan hubungan mereka dengan entitas yang mengendalikan sumber daya organisasi. Menurut teori ini, pemerintah daerah akan lebih mungkin menghasilkan laporan berkualitas tinggi mengunakan sumber daya internal dan tidak terlalu bergantung pada sumber daya eksternal serta mempunyai otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

### **Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penerapan standar akuntansi pemerintahan menjadi subjek penelitian dan diskusi di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Nigeria. Di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, transisi ke akuntansi akrual telah menjadi prioritas pemerintah melalui pengembangan standar akuntansi, kebijakan, dan sistem informasi yang relevan untuk mendukung penerapan akuntansi akrual (Ismail et al., 2018; Muhtar, 2022). Penerapan standar tersebut memerlukan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pengendalian intern, kompleksitas wilayah, dan desain ulang sistem (Muhtar, 2022; Yusof & Jaafar, 2018). Oleh karena itu, perlu memahami dan mematuhi standar akuntansi pemerintah untuk mengembangkan laporan keuangan berkualitas yang memenuhi standar yang disyaratkan. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ramadhan et al., 2022; Ramandei et al., 2019) Berdasarkan penjelasan, maka hipotesis yang diajukan:

**H<sub>1</sub>**: penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas sumber daya manusia berfokus pada peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk memberikan layanan terbaik. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat penting bagi keberhasilan organisasi, sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan visi organisasi (Mukhlis & Suharyo, 2022). Kualitas sumber daya manusia dipandang sebagai faktor penting untuk keberlanjutan dan daya saing di berbagai sektor, seperti akuntansi, kesehatan, pendidikan (Ha et al., 2020; Khurniawan et al., 2020; Vanhaecht et al., 2022) dan pemerintah. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk menjamin profesionalisme dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan (Lubis et al., 2022). Kualitas sumber daya manusia dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan sangat penting untuk menyusun laporan keuangan yang akurat. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia (Azizah & Aswar, 2022; Lestari, 2021; Lubis et al., 2022; Masnila et al., 2021; Raudhatinur et al., 2023) dan kapasitas sumber daya manusia (Lestari, 2021) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan, maka hipotesis yang diajukan:

**H<sub>2</sub>**: kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam teknologi informasi untuk mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang bertujuan untuk mengelola keuangan dan menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat. Teknologi informasi berkembang pesat dan mempunyai peluang untuk dimanfaatkan secara luas sehingga dapat memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk mengelola dan menggunakan informasi keuangan daerah secara akurat dan tepat waktu. Dampaknya, teknologi informasi akan memudahkan penyajian laporan keuangan dan pengolahan data transaksi secara tepat waktu. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Lestari, 2021; Ramadhan, et al., 2022; Ramandei, et al., 2019). Berdasarkan penjelasan, maka hipotesis yang diajukan:

**H<sub>3</sub>:** pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan melalui instrumen kuesioner, yang secara langsung disebar kepada responden. Populasi penelitian ini ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta, berjumlah 28 SKPD. Sampel penelitian ini merupakan sekretariat, badan, serta dinas pada setiap SKPD di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Responden pada penelitian ini yaitu pegawai bagian keuangan/tata usaha keuangan. Responden penelitian ini berjumlah 145 responden. Pengukuran pada kuisoner penelitian ini memakai 5 skala Likert. Metode analisis regresi linier berganda adalah cara uji yang digunakan. Alat uji hipotesis menggunakan *software* SPSS.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai penerapan atas pedoman pemerintah dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah wilayah dalam rangka menggapai transparansi serta akuntabilitas. Indikator untuk mengukurnya yaitu tingkat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 sampai 12. Indikator tersebut menggunakan 28 item pertanyaan. Kualitas sumber daya manusia didefinisikan sebagai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan pelayanan optimal. Terdapat 4 indikator untuk mengukur variabel kualitas sumber daya manusia yaitu keterampilan, pengetahuan, dan perilaku (Sukhemi & Sari, 2023). Berdasarkan indikator kualitas sumber daya manusia menggunakan 24 item pertanyaan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Terdapat 4 indikator untuk mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu pengetahuan teknologi informasi, pemrosesan informasi, penyimpanan informasi, dan teknologi komunikasi (Sukhemi & Sari, 2023). Berdasarkan indikator pemanfaatan teknologi informasi terdapat 10 item pertanyaan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dari transaksi keuangan yang berasal dari pemerintah daerah sebagai informasi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan pengembalian keputusan keuangan. Terdapat 4 indikator untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdapat 11 item pertanyaan.

## **HASIL PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang disebar selama 1 (satu) bulan. Sampel penelitian berjumlah 145 terdiri dari 6 sekretariat, 5 badan, dan 17 dinas. Berdasarkan jumlah kuesioner

yang sebanyak 145 responden atau 28 SKPD yang menjadi sampel pada penelitian. Kuesioner sebanyak 25 tidak dikembalikan, dan sebanyak 18 rusak, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 102 kuesioner. Berdasarkan hasil karakteristik responden di tunjukkan pada Tabel 1. Karakteristik responden dalam penelitian ini mencerminkan keragaman yang relevan dengan topik pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik responden mencerminkan keragaman ini dari segi jenis kelamin responden laki-laki dan perempuan memiliki representasi yang seimbang dari jenis kelamin.

Karakteristik umur responden sebagian besar responden berusia relatif muda yaitu kurang dari 30 tahun sebesar 44,1%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan generasi muda dapat memberikan wawasan baru tentang masalah yang diteliti. Selain itu, latar belakang pendidikan responden mencakup berbagai tingkatan, mulai dari diploma hingga gelar master, namun mayoritas memiliki pendidikan diploma sebesar 47,1%. Latar belakang jurusan pendidikan yang menduduki jabatan staf keuangan dan tata usaha keuangan mayoritas dari jurusan akuntansi sebesar 64,7%. Latar belakang jurusan akuntansi mendukung pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang di hasilkan. Mayoritas responden adalah staf keuangan dengan pengalaman kerja minim yaitu kurang dari 5 tahun sebesar 49%. Hal ini menunjukkan pengalaman baru lulusan jurusan akuntansi menerapkan pengetahuan yang relevan tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 1.** Karakteristik Responden

<b>Klasifikasi</b>		<b>Total</b>	<b>Persentase</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	37	36,3%
	Perempuan	65	63,7%
Umur	< 30 tahun	45	44,1%
	31-40 tahun	26	25,5%
	41-50 tahun	23	22,5%
	>50 tahun	8	7,8%
Pendidikan	SMA/SMK	12	11,8%
	Diploma	48	47,1%
	Sarjana	34	33,3%
	Master	8	7,8%
Jurusan	Akuntansi	66	64,7%
	Lainnya	36	35,3%
Jabatan	Kepala	2	2,0%
	Staf keuangan	87	85,3%
Lama kerja	Tata usaha keuangan	13	12,7%
	< 5 tahun	50	49,0%
	5-10 tahun	12	11,8%
	10-15 tahun	23	22,5%
	>15 tahun	17	16,7%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1., diketahui bahwa sebagian besar responden adalah perempuan (63,7%) yang berusia <30 tahun (44,1%). Rata-rata pendidikan pada umumnya adalah diploma dan sarjana (80,04%), sebagai staf keuangan (85,3%), dengan lama bekerja <5 tahun (49,0). Penelitian ini melakukan uji validitas dan reliabilitas data penelitian (Tabel 2). Berdasarkan Tabel 2, seluruh item pertanyaan keempat variabel dapat dinyatakan valid dan reliabel. Tabel 2 diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah disebarakan dapat diandalkan untuk menjadi alat ukur dalam penelitian ini.

**Tabel 1.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan standar akuntansi pemerintah	0,893	Reliable
Kualitas sumber daya manusia	0,811	Reliable
Pemanfaatan teknologi informasi	0,850	Reliable
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,902	Reliable

Sumber: Data diolah (2024)

Pengujian yang terakhir yaitu uji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan pengujian hipotesis (Tabel 3) menunjukkan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi  $< 5\%$ . Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa ketiga hipotesis didukung.

**Tabel 2.** Hasil Uji Hipotesis

Pengujian	Beta	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,981	0,152	0,880	
PSAP → KLKPD	0,125	2,527	0,013	H <sub>1</sub> didukung
KSDM → KLKPD	0,138	2,016	0,047	H <sub>2</sub> didukung
PTI → KLKPD	0,435	4,014	0,000	H <sub>3</sub> didukung

F hitung = 23,411, Sig. = 0,000  
Adjusted R<sup>2</sup> = 0,400

Catatan: PSAP (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah), KSDM (Kualitas Sumber Daya Manusia), PMI (Pemanfaatan Teknologi Informasi), KLKPD (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (Tabel 3) menunjukkan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t hitung 0,152 dengan signifikansi 0,013, sehingga H<sub>1</sub> didukung. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang semakin optimal mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Ramadhan et al., 2022; Ramandei et al., 2019). Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik ditunjukkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Pemerintah menganut budaya baru untuk mengikuti jalur International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), sehingga berbagai negara memiliki kecenderungan menuju standar akuntansi berbasis akrual (Gomes dos Santos & Albuquerque, 2024) terutama di Negara Indonesia. Standar sistem akuntansi berguna sebagai informasi perencanaan sumber daya untuk menganalisis, mengukur, mengevaluasi setiap alternatif proses pengambilan keputusan (Esparza-Aguilar et al., 2016; Latifah et al., 2020) dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan pengaruh kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t hitung 2,016 dengan signifikansi 0,047, sehingga H<sub>2</sub> didukung. Kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah yang semakin baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Azizah & Aswar, 2022; Dewi et al., 2019; Lubis et al., 2022). Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting untuk dikelola dan dioptimalkan dengan cara memperkecil kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai (Lumbanraja et al., 2023). Pegawai harus mempunyai kompetensi teknis yang baik,

yang mengharuskan mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang relevan guna mencapai tujuan organisasi (Diansari et al., 2023). Sumber daya manusia yang kompeten sangat penting untuk menjamin profesionalisme dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan secara akurat (Lubis et al., 2022). Kompetensi pegawai yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan berdampak pada kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga (Tabel 3) menunjukkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t hitung 4,014 dengan signifikansi 0,000, sehingga H3 didukung. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Lestari, 2021; Ramadhan et al., 2022; Ramandei et al., 2019). Pemanfaatan teknologi informasi membantu pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan sistematis dan terintegrasi, dan dapat meminimalkan kesalahan pencatatan keuangan. Perkembangan teknologi informasi memudahkan aparatur pemerintah seluruh aktivitas pengelolaan keuangan tercatat dan terdokumentasi secara akurat dan sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi membantu penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan akurat, lebih cepat dan tepat waktu, sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sukhemi & Sari, 2023).

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah yang tepat, serta peningkatan investasi kualitas sumber daya manusia yang memadai, dan pemanfaatan teknologi yang optimal mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta. Penerapan beberapa hal tersebut menjadi strategi efektif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan hanya menguji strategi pemerintah dalam penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta. Saran penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti ketidakstabilan politik, kondisi ekonomi, dan kapasitas organisasi. Kemudian saran penelitian selanjutnya merubah subjek penelitian, sehingga penelitian dapat digeneralisasi. Implikasi penelitian ini pemerintah dapat mengupdate standar akuntansi pemerintah daerah secara berkala, serta berinvestasi pada sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2020). Domination of regional wealth as a determining factor of financial statement disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 91–104. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.91-104>
- Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* (Mankeu, 12(01), 90–102. <http://m.rri.co.id/yogyakarta/politik/1031802/diy-seggera-tindaklanjut-catatan->
- Azizah, K., & Aswar, K. (2022). The quality of the government financial statements: An empirical study. *Information Management and Business Review*, 14(1(I)), 55–62. [https://doi.org/10.22610/imbr.v14i1\(i\).3311](https://doi.org/10.22610/imbr.v14i1(i).3311)
- BPK RI. (2022). BPK ungkap 9.158 temuan senilai rp18,37 triliun pada semester i tahun 2022. BPK RI.
- BPK RI Perwakilan DIY. (2022). Laporan keuangan pemerintah daerah istimewa yogyakarta tahun anggaran 2021 mendapat opini wajar tanpa pengecualian. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dewi, N. F., Azam, S. M. F., & Yusof, S. K. M. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *In Management Science Letters* (1373–1384). Growing Science. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013>
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Binti Othman, J. (2023). Factors affecting village fund management accountability in Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Erawati, T., & Abdulhadi, M. F. (2018). Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Akmenika*, 15(1), 67–78.
- Esparza-Aguilar, J. L., García-Pérez-de-Lema, D., & Duréndez, A. (2016). The effect of accounting information systems on the performance of Mexican micro, small and medium-sized family firms. *Tourism Economics*, 22(5), 1104–1120. <https://doi.org/10.5367/te.2015.0515>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Gomes dos Santos, P., & Albuquerque, F. (2024). Assessing the countries' convergence to IPSAS from a cultural perspective. *International Journal of Accounting & Information Management*, 32(2), 181–206. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-02-2023-0047>
- Ha, S. T., Nguyen, H. D. T., Nguyen, N. A. T., & Do, D. T. (2020). The outside determinants influencing quality of accounting human resources for sustainability through the lens accounting service firms in Hanoi, Vietnam. *Management Science Letters*, 543–550. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.9.026>
- Ismail, S., Siraj, S. A., & Baharim, S. (2018). Implementation of accrual accounting by Malaysian federal government. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 14(2), 234–247. <https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2017-0020>
- Jiang, H., Luo, Y., Xia, J., Hitt, M., & Shen, J. (2023). Resource dependence theory in international business: Progress and prospects. *Global Strategy Journal*, 13(1), 3–57. <https://doi.org/10.1002/gsj.1467>
- Khurniawan, A. W., Sailah, I., Muljono, P., Indriyanto, B., & Maarif, M. S. (2020). An Analysis of Implementing Total Quality Management in Education: Success and Challenging Factors. *International Journal of Learning and Development*. <https://doi.org/10.5296/ijld.v10i2.17270>
- Latifah, L., Setiawan, D., Aryani, Y. A., & Rahmawati, R. (2020). Business strategy – MSMEs' performance relationship: Innovation and accounting information system as mediators. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 28(1), 1–21. <https://doi.org/10.1108/JSBED-04-2019-0116>
- Lestari, R. (2021). The analysis of the quality influencing factors of regional government financial reports and the implication towards the government employee performance of Lampung Province Government. *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*, 3(2), 47–60. <https://doi.org/10.23960/ijebe.v3i2.60>
- Lubis, I. T., Yahya, I., Sibarani, R., & Sinurat, M. (2022). The moderating role of financial supervision toward quality of financial reporting at Deli Serdang, Indonesia. *International Journal of Finance, Economics and Business*, 1(4), 313–323. <https://doi.org/10.56225/ijfeb.v1i4.110>
- Lumbanraja, P., Lubis, A. S., & Nadapdap, K. M. N. (2023). A review of the Johari window theory as grand theory of human resource competence. *Multidisciplinary Reviews*, 7(1), 2024002. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024002>
- Masnila, N., Mayasari, R., Firmansyah, F., Febriantoko, J., & Said, J. (2021). The effect of good government governance on the financial reports quality: The case of provincial capital governments in Indonesia. *International Journal of Business, Management and Economics*, 2(4), 270–287. <https://doi.org/10.47747/ijbme.v2i4.385>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Pada Pemerintah Daerah (Vol. 2013, pp. 1–8).
- Muhtar, M. (2022). Non-compliance to SAP on local governments in Indonesia: The impact of internal control weaknesses in internal control in accounting and financial reporting and regional complexity. *Jurnal Penelitian*, 19(1), 11–22. <https://doi.org/10.26905/jp.v19i1.8261>
- Perlman, B. J., Reddick, C. G., & Zheng, Y. (2020). Agency vs. stewardship theory in local government contracted mobile apps. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 7(4), 16–34. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.20201001.0a2>

- Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu Nur Kholid, A., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Peran sistem pengendalian internal sebagai pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 330–343. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>
- Ramadhan, I., Yahya, I., & Kholis, A. (2022). Analysis of the Factors That Influence Financial Reports in Government of North Sumatera With Implementation of the Government's Internal Control System as Moderating Variable. *International Journal of Research and Review*, 9(12), 491–505. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20221255>
- Ramandei, P., Rohman, A., Ratmono, D., & Ghozali, I. (2019). Interactions of financial assistance and financial reporting competency: Evidence from local government in Papua and West Papua Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p1>
- Raudhatinur, R., Meutia, R., & Saputra, M. (2023). The effect of human resource competency and government internal control system on the quality of local government financial report with information technology as a moderation variable in aceh government. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(01). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i1-67>
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah (pp. 1–14). [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)
- Schakel, A. H., & Romanova, V. (2022). Regional assemblies and executives, regional authority, and the strategic manipulation of regional elections in electoral autocracies. *Regional & Federal Studies*, 32(4), 413–435. <https://doi.org/10.1080/13597566.2022.2103546>
- Setyaningrum, D., Siswanto, D., & Darmastuti, D. (2020). Factors affecting the usefulness of governments' financial statements in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(4), 117–134.
- Sukhemi, & Sari, M. W. (2023). The influence of employee competence and use of information technology on financial accountability with the success of information systems as moderating variables. *Asian Journal of Business and Accounting*, 16(2), 179–205. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no2.6>
- Vanhaecht, K., Seys, D., Russotto, S., Strametz, R., Mira, J., Sigurgeirsdóttir, S., Wu, A. W., Pölluste, K., Popovici, D. G., Sfetcu, R., Kurt, S., & Panella, M. (2022). An evidence and consensus-based definition of second victim: A strategic topic in healthcare quality, patient safety, person-centeredness and human resource management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24), 16869. <https://doi.org/10.3390/ijerph192416869>
- Yu, S., & Greer, L. L. (2023). The Role of Resources in the Success or Failure of Diverse Teams: Resource Scarcity Activates Negative Performance-Detracting Resource Dynamics in Social Category Diverse Teams. *Organization Science*, 34(1), 24–50. <https://doi.org/10.1287/orsc.2021.1560>
- Yusof, N. S., & Jaafar, H. (2018). The implementation of accrual-based accounting in Malaysian public sector: opportunities and challenges. *International Business Education Journal*, 11(1), 49–62. <https://doi.org/10.37134/ibej.vol11.1.5.2018>